

# KEBIJAKAN ANTISIPATIF TERHADAP PERATURAN DAN KEBIJAKAN PERUNGGASAN PEMERINTAH DKI 2010

## *Anticipating Jakarta Provincial Government's Regulation on Poultry in 2010*

Saptana dan Sumaryanto

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No. 70 Bogor, 16161*

### ABSTRACT

Poultry industry is potential to sustain economic growth with equity. A commercial poultry industry is susceptible to external environment especially epidemic disease, such as Avian Influenza (AI). Enactment of regional regulation of Jakarta Province No. 4/2007 on poultry farms and the products distribution in Jakarta region, as well as marketing regulation change from live poultry to poultry meats will raise a problem of distributing live chicken from the poultry producing centers to Jakarta as the market destination. It suggests that small-scale poultry farms to consolidate to establish a partnership that their scale becomes large enough to own the cold chain facilities. Poultry farmers need to have a good planning on total demand, markets shares, and market destination as well as products distribution. In the future, efficient supply chain management is required to meet the formal standard and consumers' demand. This policy will be well implemented if all stakeholders involved are integrated in conducting this regulation.

**Key words** : *policy, regulation, poultry, Jakarta*

### ABSTRAK

Perunggasan merupakan basis ekonomi yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*growth with equity*), apabila dikelola dengan baik dan benar. Industri perunggasan komersial sangat rentan terhadap gejala eksternal, terutama wabah penyakit menular seperti flu burung (*Avian Influenza/AI*). Dengan adanya Perda DKI No. 4 Tahun 2007 tentang pengaturan pemeliharaan dan pengendalian peredaran unggas di wilayah DKI dan tuntutan pemasaran dari unggas hidup ke daging unggas melalui rantai dingin (*cold chain*), maka diperkirakan akan menyebabkan permasalahan distribusi ayam hidup dari daerah pemasok utama ke wilayah DKI Jakarta. Kondisi ini menuntut peternak rakyat untuk bergabung dalam kemitraan usaha terpadu yang mampu memfasilitasi pengadaan infrastruktur rantai dingin. Peternak harus merencanakan pengembangan secara matang mulai dari jumlah pasar, pangsa pasar, dan tujuan pasar yang dituju selanjutnya ke arah pengembangan produksi baik dari aspek jumlah dan distribusi antar waktu, serta sistem penanganannya. Dari sisi permintaan produk yang dihasilkan oleh industri perunggasan (*broiler*) ke depan, harus disadari bahwa dengan adanya peraturan dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut maka

bagi pelaku ekonomi perunggasan harus membangun manajemen rantai pasok (*supply chain management/SCM*) yang efisien melalui rantai dingin agar dapat memenuhi persyaratan Pemerintah DKI dan tuntutan konsumen. Implikasi kebijakan penting berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah DKI hanya akan berhasil dengan baik kalau mampu mengintegrasikan antara berbagai aspek, baik aspek teknis, ekonomi atau bisnis, kelembagaan dan aspek kebijakan dan peraturan.

**Kata kunci** : *kebijakan, peraturan, perunggasan, Pemerintah DKI*

## PENDAHULUAN

Perunggasan merupakan basis ekonomi yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*growth with equity*), apabila dikelola dengan baik dan benar. Sumber-sumber pertumbuhan industri perunggasan ke depan dari sisi permintaan ditentukan oleh jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya, peningkatan pendapatan, tingkat urbanisasi, kualitas dan pengembangan produk (fenomena segmentasi pasar), serta preferensi konsumen. Sementara itu, sumber-sumber pertumbuhan dari sisi penawaran ditentukan oleh perkembangan teknologi budidaya, perkembangan genetika, *genetic base* yang terkonsentrasi, harga biji-bijian dan distribusi penggunaannya, serta kategori pakan. Di samping itu, pertumbuhannya sangat ditentukan adanya koordinasi yang harmonis antar stakeholders yang tercakup baik di daerah sentra produksi maupun di pusat pasar seperti halnya DKI Jakarta.

Perkembangan total populasi perunggasan (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik) meningkat dari 1,21 juta ekor (2005) menjadi 1,52 juta ekor (2008) atau mengalami pertumbuhan 6,6 persen pertahun (Ditjennak, 2008). Di antara jenis unggas pertumbuhan populasi tertinggi dijumpai pada ayam ras pedaging yang tumbuh sebesar 8,7 persen pertahun, bahkan jenis ayam ini pada periode terakhir 2007-2008 mengalami pertumbuhan sangat tinggi mencapai 20,6 persen pertahun. Kontribusi terhadap produksi daging, produksi daging asal unggas adalah yang paling dominan mencapai 62,6 persen (2005-2008). Kontribusi daging ayam ras (*broiler*) mencapai 992,7 ribu ton dari total daging unggas 1,48 juta ton (70,24 %).

Sementara itu, dari sisi konsumsi menunjukkan bahwa tingkat konsumsi daging perkapita terus meningkat, sebagai ilustrasi tingkat konsumsi daging pada tahun 2006 sebesar 4,5 kg/kapita/tahun (FAO, 2006) kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 6,7 kg/kapita/tahun (FAO, 2008) atau meningkat sebesar 13 persen/tahun. Hasil proyeksi yang dilakukan ICN diperkirakan total konsumsi daging ayam ras pada tahun 2012 mencapai 1.947 juta ekor (ICN, Agustus 2009). Total konsumsi daging di Jakarta mencapai 188,18 ribu ton dan menduduki urutan ke empat setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Beberapa permasalahan utama dalam industri perunggasan adalah : (a) Masalah penyediaan bahan baku pakan industri perunggasan, di mana sebagian besar bahan baku pakan ternak penting harus diimpor; (b) Adanya indikasi terjadinya ketimpangan struktur pasar baik pada pasar input maupun pasar output; (c) Kemitraan usaha (*contract farming*) perunggasan belum berjalan secara optimal; dan (d) Industri perunggasan komersial sangat rentan terhadap gejolak eksternal, seperti moneter dan krisis ekonomi, wabah penyakit ternak seperti flu burung (*Avian Influenza/AI*), dan krisis finansial global dewasa ini; serta (e) Kondisi terakhir adanya kebijakan perunggasan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2010 yang mensyaratkan bahwa unggas yang masuk wilayah DKI harus sudah dalam bentuk karkas atau daging ayam (Setiarto, 2009). Hal tersebut menuntut adanya penyesuaian bagi pelaku industri perunggasan hulu, khususnya peternak dan pedagang ayam ras pedaging (*broiler*) dari daerah-daerah pemasok utama (Bogor, Depok, Tangerang, Sukabumi, Cianjur, Ciamis dan Tasikmalaya).

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis: (1) dinamika bisnis perunggasan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi; (2) implementasi kebijakan Pemda DKI di bidang perunggasan; (3) Dampak peraturan dan kebijakan Pemda DKI terhadap industri perunggasan terutama peternak rakyat; dan (4) Merumuskan strategi kebijakan untuk antisipasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah DKI.

## **DINAMIKA PERKEMBANGAN BISNIS PERUNGGASAN**

### **Perkembangan Bisnis Perunggasan**

Secara historis terdapat beberapa tahapan perkembangan bisnis perunggasan, paling tidak dapat dibagi ke dalam enam fase : (a) fase tahun 1990-1996 atau fase sebelum krisis moneter; (b) fase tahun 1997-1999, fase menghadapi krisis moneter dan ekonomi; (c) Fase tahun 2000-2009, sebagai fase terjadi *outbreak Avian Influenza* yang terjadi pada tahun 2003-2004 dan zoonosis yang terjadi pada tahun 2005; dan (d) Fase 2010-masa mendatang, sebagai perubahan iklim (*climate change*) dan kebijakan penataan pasar unggas perkotaan dengan adanya kebijakan yang mensyaratkan bahwa unggas yang masuk ke wilayah DKI harus dalam bentuk karkas dan tidak boleh dalam bentuk ayam hidup.

### **Fase Tahun 1990-1996**

Pada fase 1990-1996 bisnis ayam ras (*broiler*) dipandang berjalan sangat bagus, yang antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan populasi yang cukup tinggi, peternak mendapatkan keuntungan yang cukup memadai dan pendapatan yang diperoleh relatif stabil, pemasaran hasil unggas berjalan lancar. Pada tahun 1996 karena pertumbuhan populasi dan produksi yang tinggi, di sisi lain daya serap

pasar tumbuh lebih lambat sebagai akibat daya beli masyarakat yang menurun, sehingga ditengarai terjadinya *over supply* dan bisnis peternak unggas mendekati harga pokok produk. Pada tahun 1996 dapat dikatakan peternak dalam kondisi impas atau *profit margin* minimal, karena mulai tidak stabilnya kondisi makro ekonomi.

### **Fase Tahun 1997-1998 : Krisis Moneter dan Ekonomi dan Penyesuaiannya**

Pada fase tahun 1997-1998, peternak unggas mengalami kerugian besar. Berdasarkan informasi kualitatif dari Ditjen Peternakan yang dikutip oleh Saptana (1999) diperoleh informasi bahwa akibat krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia (1997-1998), populasi ayam ras pedaging (*broiler*) pada tahun yang sama diperkirakan secara nasional tinggal 30 persen. Hasil penelusuran data di Jawa Barat diperoleh informasi bahwa populasi ayam ras pedaging di Jawa Barat masih mencapai 58 persen dari total populasi Jawa Barat tahun 1996 yang mencapai 35,88 juta ekor. Hasil penelitian Saptana (1999) menunjukkan bahwa bagi petani yang mengalami kerugian besar sebagian besar gulung tikar, namun sebagian peternak yang cukup efisien masih mampu bertahan dan masih menguntungkan, meskipun keuntungannya merosot tajam. Sebagai ilustrasi dalam kondisi krisis moneter, usaha ternak Pola Kawasan Industri Peternakan Rakyat Agribisnis (KINAK PRA) masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1,13 juta/4000 ekor/siklus, yang biasanya keuntungannya di atas Rp. 4 juta. Pada kondisi yang sama untuk peternak Pola Kawasan Industri Peternakan Perusahaan Inti Rakyat (KINAK PIR) masih memberikan keuntungan Rp. 1,84 juta/6000 ekor/siklus. Untuk Pola Peternak Mandiri yang efisien dan masih tetap bertahan masih memberikan keuntungan Rp.2,12 juta/8000/ekor/siklus.

Karakteristik perubahan pada fase tersebut adalah : (a) harga pakan naik, pakan stater naik dari Rp. 929/kg (1996) meningkat menjadi Rp. 3.300/kg (1998) dan untuk pakan *finisher* naik dari Rp 912/kg meningkat menjadi Rp.3.300/kg atau meningkat lebih dari tiga kali lipat; (b) harga DOC broiler naik dari Rp. 1,026/ekor meningkat Rp. 2.500, namun kondisi DOC sulit menjualnya (kurang laku); (c) di sisi lain harga jual hasil ternak *broiler* hidup naik dari Rp. 3.586/kg menjadi Rp. 6.980 (1998) dan harga karkas *broiler* naik dari Rp. 4.699/kg menjadi Rp. 10.500/kg, keduanya naik kurang dari dua kali lipat.

Beberapa tindakan penyesuaian yang dilakukan oleh peternak dalam menghadapi berbagai dampak krisis moneter untuk dapat bangkit kembali : (a) prinsip “*jika usaha diteruskan maka bisa hidup atau mati, tapi jika usaha dihentikan sudah pasti mati*”; (b) tetap menjaga hubungan baik dengan supplier untuk menjaga hubungan baik dengan supplier; (c) semua hutang piutang diselesaikan melalui perencanaan waktu pembayaran; dan (d) harus punya keyakinan bahwa ada siklus bisnis. Ternyata benar peternak mengalami keuntungan yang cukup besar setelah ada penyesuaian harga-harga baik input maupun output.

## **Fase Tahun 2000-2007 : Krisis Terberat Peternak Unggas**

Krisis terberat yang dirasakan peternak unggas justru pada tahun 2003-2004 ketika adanya AI (*Avian Influenza : Penyakit Strategis*) dan Tahun 2005 ketika pengumuman *zoonosis* (Hardiyanto, 2009). Hal ini antara lain disebabkan : (a) krisis berlangsung cukup lama (2003-2005); (b) krisis berlangsung hanya pada dunia perunggasan saja, bukan pada usaha lainnya; (c) dampak yang ditimbulkannya sangat dalam dan menyentuh seluruh sub sistem dalam keseluruhan jaringan agribisnis perunggasan.

Hasil kajian Saptana *et al.* (2005) tentang dampak ekonomi flu burung terhadap kinerja industri perunggasan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : (a) dampak ekonomi AI terhadap perusahaan pembibitan (*breeding farm*) adalah terjadinya penurunan volume produksi DOC hingga 40 persen dan menurunnya harga penjualan DOC hingga jauh di bawah BEP atau mengalami penurunan sebesar 70 persen; (b) dampak ekonomi AI terhadap perusahaan pakan ternak menyebabkan terjadi penurunan volume produksi sebesar 14,58 persen, tetapi tidak berdampak terhadap menurunnya harga jual pakan, bahkan harga pakan selalu bergerak naik dari waktu ke waktu, karena pabrik pakan punya usaha budidaya dan melakukan kemitraan usaha; (c) dampak ekonomi AI terhadap usaha distribusi saponak oleh *Poultry Shop* (PS) adalah telah terjadi penurunan volume penjualan pakan, di mana untuk PS agen mengalami penurunan sekitar 40 persen dan PS penyalur sebesar 75 persen; (d) dampak ekonomi AI terhadap usaha budidaya adalah banyaknya peternak yang gulung tikar (30-40 %); (e) dampak ekonomi AI terhadap usaha jasa pemotongan adalah penurunan jumlah ayam yang dipotong sebesar 40 persen; dan (f) dampak ekonomi AI terhadap pedagang pengumpul *broiler* adalah terjadinya penurunan volume penjualan hingga 80-an persen.

Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2005 karena seluruh kebijakan pemerintah dan pola pikir masyarakat terhadap unggas mulai berubah baik dari sudut pandang teknik budidaya secara lebih baik, lokasi kandang yang makin memperhatikan kondisi lingkungan, penanganan *biosecurity* yang lebih ketat, pengelolaan Rumah Potong Ayam (RPA) secara lebih baik, adanya rencana perubahan dalam pengelolaan pasar unggas hidup, dan konsumsi daging ayam. Krisis berat lainnya akhir tahun 2007 ketika kenaikan harga minyak dunia yang memicu kenaikan BBM dalam negeri dan sangat membebani usaha ternak unggas.

## **Fase 2007-2009 : Krisis Finansial Global**

Di samping krisis keuangan global yang mulai terasa pada akhir tahun 2008, juga terjadi krisis pangan (*food*) dan energi (*fuel*) yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, yang sering disebut sebagai krisis kembar. Pada semester pertama tahun 2008, Indonesia seperti juga negara-negara lain di dunia mengalami kenaikan harga bahan pangan yang sangat tinggi. Harga komoditas pangan meningkat sebesar 2-3 kali dibandingkan dengan harga pangan pada tahun 2005.

Faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga pangan dunia tersebut adalah (Daryanto, 2008) : (a) fenomena perubahan iklim global yang berakibat pada rendahnya persediaan pangan global, (b) peningkatan permintaan konversi komoditas pangan untuk bahan bakar nabati, (c) peningkatan komoditas pangan di negara-negara berkembang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, misalnya di negara-negara BRICs (Brazil, Rusia, India dan China,) (d) aksi spekulasi yang dilakukan oleh investor di pasar komoditas global karena kondisi pasar keuangan global yang tidak menentu, dan (e) peningkatan biaya produksi terkait dengan naiknya harga minyak bumi.

Pada semester ke dua tahun 2008, harga beberapa komoditas pangan strategis mengalami penurunan yang sangat tajam. Krisis keuangan global mengakibatkan melemahnya daya beli (*purchasing power*) sehingga volume transaksi perdagangan pangan global menurun secara tajam. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap menurunnya harga komoditas pangan antara lain adalah menurunnya harga minyak bumi dunia.

Selain rendahnya tingkat daya beli konsumen, sektor peternakan terutama produk unggas di Indonesia juga menghadapi tantangan antara lain belum tuntasnya penanganan wabah penyakit khususnya flu burung (AI), besarnya ketergantungan impor pakan, serta meningkatnya harga-harga jagung dan kedelai yang menjadi bahan baku pakan di pasar internasional, serta kebijakan antara daerah pemasok dan tujuan pasar yang belum sinkron. Hal ini setidaknya akan mengganggu kinerja sektor peternakan dan industri perunggasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat secara tidak langsung akan mempengaruhi ekonomi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Memang fenomena saat ini mengingatkan pada situasi 1998. Namun krisis moneter dan ekonomi 1998 lebih besar dampaknya bagi kita dari pada krisis finansial global yang sekarang. Karena krisis 1998 lalu kerusakannya disebabkan oleh faktor dari dalam dan Indonesia dalam kondisi tidak siap, sedangkan sekarang ini kerusakan datang dari luar dan Indonesia sudah lebih siap menghadapinya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 akan lebih sulit dengan pertumbuhan tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Namun tidak akan mengalami pertumbuhan negatif yang besar seperti pada tahun 1998.

Dampak krisis keuangan global diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kinerja industri perunggasan Indonesia. Harga ayam *broiler* di Jabotabek akhir tahun 2008 mengalami stagnasi dengan kisaran harga antara Rp. 9.500-10.100,-/kg broiler (Trobos, Januari 2009). Hingga maret 2009 harga *broiler* masih rendah yaitu sebesar Rp. 11.600,-/kg, namun pernah menyentuh Rp. 14.600/kg *broiler* (Trobos, 15 April 2009). Dikemukakan bahwa pada periode tahun 2008, peternak masih menerima keuntungan, namun diperkirakan keuntungan mengalami penurunan kurang lebih 40 persen dibandingkan tahun 2007.

Di samping itu potensi penggunaan bahan bakar etanol (*biodisel*) sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak pun sedang digalakkan oleh beberapa

negara besar seperti Amerika Serikat akan mempengaruhi harga jagung di pasar internasional. Jagung merupakan bahan utama pakan unggas. Jagung yang berasal dari Argentina, AS dan China sampai saat ini masih merupakan andalan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak unggas di negeri ini.

### **Fase 2010: *Climate Change* dan Kebijakan Penataan Pasar Unggas Perkotaan**

Kinerja dan keberhasilan usahaternak ditentukan oleh resultante bekerjanya demikian banyak faktor, baik yang dapat dikendalikannya (internal) maupun yang tidak dapat dikendalikannya (eksternal). Faktor-faktor internal berkaitan erat dengan kapabilitas manajerial dalam mengelola usahaternak. Tercakup dalam gugus faktor ini adalah tingkat penguasaan teknologi pembibitan, budidaya, dan pasca panen serta kemampuan dalam mengendalikan risiko.

Sementara itu, beberapa faktor eksternal mencakup perubahan iklim (*climate change*), serangan OPT, bencana alam, serta harga input dan output. Faktor cuaca yang sering berpengaruh terhadap produksi pertanian terdapat peternakan adalah curah hujan dan kekeringan. Anomali iklim ditandai oleh nilai *Southern Oscillation index* (SOI) negatif (*El Nino*) dan SOI positif (*La Nina*) (Irianto *et al.*, 2000). Anomali iklim ini diakibatkan oleh adanya “*Interannual Oscillations*” antara suhu permukaan air laut dan tekanan dasar laut di Samudera Pasifik. Gejala yang mengakibatkan suhu permukaan air laut cenderung meningkat dinamakan *El Nino* yang umumnya ditandai oleh musim kering yang berkepanjangan. Sementara nilai osilasi yang cenderung menyebabkan penurunan suhu permukaan laut dikenal dengan gejala alam *La Nina* yang berdampak pada meningkatnya curah hujan.

Di Indonesia pola iklim sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi komoditi pertanian termasuk peternakan yang dihasilkan, sehingga kejadian *El Nino* dan *La Nina* yang cenderung meningkat dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian pangan baik nabati maupun hewani dan mengancam ketahanan pangan nasional. Irawan *et al.*, (2003) menyebutkan bahwa kejadian *El Nino* cenderung meningkat sejak tahun 1925 yakni 2 kasus selama 1926-1950, 3 kasus tahun 1951-1975 dan 7 kasus tahun 1976-2000. Kondisi perubahan iklim yang semakin intens harus diantisipasi dengan cermat oleh pelaku ekonomi khususnya para peternak unggas yang merupakan bisnis bernilai ekonomi tinggi yang sangat rentan terhadap faktor eksternal.

Pada fase 2010 hingga masa mendatang diperkirakan tantangan peternak, khususnya peternak rakyat akan semakin besar, terutama peternak yang memasok ke wilayah DKI. Pemda DKI telah mengeluarkan Perda DKI No. 4/2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas yang implementasinya akan diberlakukan tahun 2010. Kebijakan atau peraturan tersebut mensyaratkan bahwa unggas yang boleh memasuki pasar DKI adalah unggas (*broiler*) yang sudah

dalam bentuk daging ayam (karkas). Kebijakan ini ditujukan untuk pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di wilayah DKI. Kebijakan ini diperkirakan akan memiliki dampak terhadap industri perunggasan terutama peternak rakyat dan bagi masyarakat konsumen di wilayah Jakarta. Salah satu tantangan bagi peternak unggas adalah Perda DKI Jakarta tentang unggas hidup dilarang masuk pasar Jakarta dan di sisi lain belum ada kepastian pasar untuk produk yang menggunakan rantai dingin (*cold storage*). Pelaksanaan Perda DKI No. 4/2007 tersebut perlu mempertimbangkan aspek kebijakan/peraturan, aspek pengendalian penyakit, aspek bisnis perunggasan, kesiapan pelaku baik di daerah pemasok maupun di daerah tujuan pasar, serta kesiapan masyarakat konsumen.

## **KONDISI PERUNGGASAN DI DKI JAKARTA**

Pada awalnya, kegiatan peternakan unggas berkembang pada dua tipe wilayah yang memiliki keunggulan dan kelemahan relatif (Saragih, 1998). Tipe wilayah pertama adalah wilayah yang memiliki keunggulan relatif pada aspek sosial ekonomi (infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi, akses ke pasar, dan fasilitas lainnya), namun lemah dalam biofisik. Termasuk dalam tipe ini adalah wilayah sekitar perkotaan, dulu hanya mencakup wilayah DKI Jakarta, namun sekarang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).

Tipe wilayah ke dua, adalah wilayah yang memiliki keunggulan relatif biofisik (ketersediaan lahan, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, serta kesesuaian iklim atau cuaca dan lingkungan yang masih mendukung), namun memiliki kelemahan aspek sosial ekonomi. Ke dalam tipe ini termasuk wilayah perdesaan, dahulu wilayah Bogor-Sukabumi-Cianjur (BOSUCI) masuk dalam kategori ini, namun sekarang wilayah Jabotabek masuk dalam kategori pertama. Wilayah seperti Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Ciamis dapat dimasukkan dalam kategori yang ke dua.

Adanya faktor keunggulan yang dimiliki kedua tipe wilayah tersebut dapat menjelaskan mengapa kegiatan peternakan khususnya perunggasan masih berkembang di Jabotabek dan mereka enggan melakukan relokasi ke wilayah lain. Sebagai ilustrasi daerah sentra produksi ayam ras petelur dan pedaging di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang peruntukannya akan dialokasikan untuk sektor ekonomi lainnya, peternak enggan melakukan relokasi dan beberapa melakukan relokasi pada daerah yang masih berdekatan, yaitu Kecamatan Rumpin, Bogor.

Dengan makin tersedianya infrastruktur pembangunan antarwilayah (infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi, infrastruktur pemasaran) dan berkembangnya teknologi budidaya perunggasan maka perbedaan keunggulan dan kelemahan keduanya makin menyempit. Dengan tersedianya infrastruktur jalan

dan fasilitas transportasi dan ke depan diperkirakan akan berkembang sistem transportasi berpendingin (*coldstorage*), keunggulan akses terhadap pasar yang semula hanya dimiliki wilayah DKI Jakarta, kemudian Jabotabek, dewasa ini juga dimiliki wilayah Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Ciamis, bahkan dari wilayah Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur secara periodik juga memasok ayam ke pasar DKI Jakarta. Demikian juga dengan kemajuan teknologi budi daya perunggasan yang mampu memanipulasi pengaruh lingkungan, maka keunggulan biofisik yang semula hanya dimiliki wilayah Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Ciamis, kini juga telah dimiliki wilayah Jabotabek (misalnya melalui pengembangan usahaternak ayam ras *close house*).

Namun demikian perkembangan Kota DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat perdagangan menjadikan wilayah DKI tidak layak untuk mengembangkan kegiatan budidaya perunggasan, terlebih setelah merebaknya wabah flu burung (*Avian Influenza/AI*). Hal ini berarti, secara teknis kegiatan perunggasan harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan tata ruang wilayah yang sedang berkembang.

Perkembangan periode (2004-2008) di wilayah DKI Jakarta sudah tidak ditemukan lagi usahaternak ayam ras petelur. Namun masih ditemukan usahaternak ayam ras pedaging, pada tahun 2004 populasinya masih mencapai 138 ribu ekor dan menurun menjadi 115 ribu ekor pada tahun 2008 atau turun sebesar 20 persen selama periode tahun 2004-2008 (Ditjennak, 2008). Demikian juga halnya ayam buras di DKI Jakarta sudah makin berkurang tinggal 13 ribu ekor. Pemeliharaan unggas di wilayah DKI Jakarta umumnya diusahakan di daerah pemukiman penduduk (100%), karena sudah tidak ada ruang kosong untuk usahaternak unggas. Dari pengusaha unggas yang ada di wilayah DKI Jakarta umumnya tanpa adanya izin usaha (100%), karena umumnya diusahakan oleh peternak skala kecil dan merupakan usaha keluarga.

Berdasarkan informasi dari data Dinas Peternakan Provinsi DKI Jakarta bahwa pada saat di wilayah DKI Jakarta terdapat 1.153 TPA dan 219 TpnA yang lokasinya sangat tersebar di seluruh wilayah (Dinas Peternakan DKI Jakarta, 2008). Sebagian besar ayam ras pedaging berasal dari luar wilayah terutama Jawa Barat, yang masuk ke wilayah DKI Jakarta melalui pintu masuk Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. Jumlah ayam yang dipotong setiap hari diperkirakan mencapai 600 ribu ekor, di mana 400 ribu dipotong di wilayah DKI dan 200 ribu dipotong di luar wilayah DKI Jakarta.

Tempat Pemotongan Ayam (TPA) dan Tempat Penampungan Ayam (TpnA) di wilayah DKI Jakarta mencakup wilayah yang sangat luas dan tersebar seperti di Penjaringan, Koja, Cilincing, Pademangan, Tanjung Priok, Kalideres, Cengkareng, Tamansari, Tabora, Kelapa Gading, Taman Sari, Sawah Besar, Grogol, Petamburan, Gambir, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Johar Baru, Cakung, Kembangan, Pal Merah, Matraman, Pulogadung, Tanah Abang, Setia Budi, Tebet, Jatinegara, Kebayoran lama, Kebayoran Baru, Duren Sawit,

Mampang, Pasanggrahan, Kramat Jati, Makasar, Cilandak, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Jagakarsa, Cirakas, dan Cipayung (Setiarto, 2009). Nampak bahwa sebaran TPA dan TpnA berimpit dengan sebaran pasar-pasar tradisional sebagai pusat-pusat konsumen. Dalam situasi seperti ini, tanpa adanya upaya relokasi baik di dalam maupun di luar wilayah DKI Jakarta maka penanggulangan wabah penyakit khususnya AI akan sulit diatasi dengan baik. Namun demikian upaya relokasi yang hanya dilandasi kebijakan dan peraturan hukum dan kurang mempertimbangkan aspek bisnis bisa menimbulkan masalah sosial ekonomi yang serius terutama bagi pelaku agribisnis perunggasan dan konsumen.

Rencana relokasi tahun 2010 akan dilakukan baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah DKI Jakarta. Rumah Potong Unggas (RPU) di Jakarta dengan fasilitas yang standar akan dilakukan di beberapa lokasi, antara lain : (1) RPU Rawa Kepiting (Dinas Peternakan) dengan kapasitas 70 ribu ekor; (2) RPU Cakung (BUMD) dengan kapasitas 40 ribu ekor; (3) RPU Pulogadung (BUMD) dengan kapasitas 40 ribu ekor; (4) RPU Petukangan Utara (dinas) dengan kapasitas 20 ribu ekor; dan (5) RPU Kartika Eka Dharma (swasta) dengan kapasitas 40 ribu ekor. Selain itu, juga akan dibangun RPU di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta, yaitu di Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan kapasitas yang memadai.

Sistem pemasaran ayam ras pedaging dari peternak di daerah sentra produksi ke pedagang pengumpul (*middleman*) dan dari pedagang *middle man* ke pedagang-pedagang besar di daerah tujuan pasar di wilayah DKI Jakarta, serta dari pedagang besar ke pedagang pengecer sebagian besar dalam bentuk *broiler* hidup. Selanjutnya pedagang pengecer menjual ke konsumen melalui pasar-pasar tradisional sudah dalam bentuk karkas. Diperkirakan penjualan ayam dalam bentuk karkas ini dilakukan baik melalui pasar tradisional atau yang sering dikenal dengan pasar becek (kurang lebih 80 persen) dan melalui pasar modern (swalayan, supermarket/hypermarket) kurang lebih mencapai 20 persen.

Pola perdagangan yang sudah berjalan selama ini secara bisnis oleh pelaku tata niaga ayam ras (*broiler*) dipandang yang paling menguntungkan. Namun kelemahannya adalah sangat potensial menyebarkan penyakit terutama yang sifatnya menular pada manusia, seperti kasus flu burung yang terjadi pada tahun 2003-2005. Hal ini disebabkan sistem distribusi dan pengangkutan dari sentra produksi ke TPA dan TpnA umumnya dilakukan dengan truk dengan bak terbuka dalam kondisi ayam hidup, TPA dan TpnA yang tidak memenuhi standar *hygienis*, lokasi TPA dan TpnA sangat menyebar dan berada di wilayah pemukiman penduduk, serta pemasaran melalui pasar-pasar tradisional atau pasar becek yang umumnya tidak memenuhi standar kebersihan. Dalam kondisi seperti ini yang paling dirugikan adalah masyarakat dan konsumen. Masyarakat menerima dampak negatif dari kegiatan penampungan ayam dan penanganan pemotongan ayam karena dilakukan ditengah-tengah pemukiman. Sementara itu, konsumen seringkali menerima produk ayam yang dalam kondisi tidak segar dan banyak ditemukan penggunaan bahan pengawet, seperti formalin.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUNGGASAN DKI DAN DAMPAKNYA

### Peraturan dan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah DKI terkait dengan pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas antara lain adalah (Setiarto, 2009) : (a) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007, tanggal 24 April 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas; (b) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 146 Tahun 2007, 13 Nopember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pemeliharaan Dan Peredaran Unggas; (c) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 147 Tahun 2007, 13 Nopember 2007 tentang Komite Provinsi Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan menghadapi pandemi *Influenza*; (d) Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2008, 29 Februari 2008 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas.

Kebijakan ini dilandasi oleh beberapa hal, yaitu cukup banyaknya kasus flu burung pada manusia yang mencapai 8 orang, banyaknya kasus AI pada unggas hingga mencapai 86 kasus yang ditemukan di DKI (Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara). Masih cukup banyaknya pemeliharaan unggas di daerah pemukiman penduduk. Sebagian besar usaha pemeliharaan unggas tanpa mendapatkan izin dan dengan penerapan *biosecurity* yang terbatas. Banyak unggas baik dari dalam wilayah maupun luar wilayah yang belum disertifikasi. Ditemukan cukup banyaknya jumlah tempat pemotongan ayam (TPA) mencapai 1.153 unit TPA, 219 unit dan Tempat Penampungan ayam (TpnA) yang tersebar, dengan pengelolaan yang kurang *hygienis*. Tingginya jumlah ayam yang dipotong di wilayah DKI yang mencapai 400.000 ekor yang berpeluang menyebarkan wabah penyakit, seperti kasus AI.

### Program Kegiatan yang Dilakukan

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DKI meliputi : (a) melakukan sertifikasi terhadap unggas yang masuk wilayah DKI; (b) melakukan desinfeksi/*biosecurity* secara standar; (c) melakukan *surveilans* dan PDSR (*Participatory Disease Search & Respond*); (d) melakukan *sweeping*/depopulasi unggas; (e) melakukan restrukturisasi perunggasan DKI Jakarta; (f) melakukan pengawasan lalulintas dan peredaran unggas; (g) Pembuatan peraturan dan kebijakan tentang pemeliharaan dan peredaran unggas; (h) melakukan koordinasi atau kerjasama antarprovinsi dan antarsektoral dalam pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas; (i) Kerjasama dengan daerah pemasok; (j) Pembangunan Rawa Kepiting sebagai salah satu tempat pemotongan dan penampungan unggas dengan fasilitas yang baik; (k) Percontohan pemasaran *broiler* dengan rantai

dingin (*cold chains*); (l) Pembinaan alih usaha di wilayah DKI Jakarta dari budidaya unggas ke usaha lain; (m) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik tentang peraturan dan kebijakan perunggasan di wilayah DKI Jakarta; (n) melakukan studi sosial ekonomi dan *public awareness* oleh FAO terutama berkaitan dengan wabah AI dan penyebarannya; dan (o) melakukan uji coba operasi transportasi ayam sehat khususnya melalui transportasi rantai dingin.

Restrukturisasi perunggasan Pemda DKI Jakarta ditujukan antara lain untuk mengurangi peredaran atau lalu lintas unggas hidup, yang telah terbukti menyebarkan penyakit ke manusia. Dengan menurunkan jumlah unggas hidup yang masuk dan waktu atau lamanya ditampung di TpnA di wilayah DKI diharapkan dapat mengurangi penyebaran penyakit secara efektif. Namun, diperkirakan implementasi peraturan pelarangan terhadap sistem distribusi dan pemasaran unggas hidup dalam waktu dekat (2010) akan membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat baik di daerah asal maupun tujuan pasar Jakarta. Guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan perlu langkah-langkah antisipatif. Langkah-langkah kebijakan antisipatif haruslah mengintegrasikan tiga aspek penting yaitu masalah penataan ruang wilayah, harmonisasi antar subsistem dalam sistem agribisnis perunggasan (*broiler*), serta aspek penanganan kesehatan hewan (*veteriner*).

Penataan ruang wilayah harus jelas, dari perencanaan hingga pelaksanaannya dan jelas dimensi waktunya, baik di daerah-daerah sentra produksi maupun di daerah tujuan pasar seperti halnya wilayah DKI. Mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan pasar dengan mensyaratkan bahwa ayam yang masuk ke wilayah DKI Jakarta adalah ayam sudah dalam bentuk karkas atau daging ayam, maka mensyaratkan adanya keterpaduan produk (dari tingkat usahaternak hingga tingkat konsumen) dan keterpaduan antar pelaku yang tercakup dalam sistem agribisnis perunggasan. Sementara itu, dari aspek kesehatan hewan dilakukan dengan meningkatkan kesehatan dan sanitasi ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Hasil studi yang dilakukan FAO dalam Setiarto (2009) mengungkapkan bahwa dari kondisi 10 pasar yang disurvei menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan biosekuriti sembilan pasar dikategorikan jelek dan hanya satu dikategorikan sedang. Sementara itu, dari 38 pedagang yang di survei diperoleh informasi bahwa 94,7 persen pelaksanaan biosekuriti oleh pedagang ayam buruk dan hanya 5,3 persen yang dalam kategori sedang. Di samping itu, juga diperoleh informasi bahwa unggas yang datang ke pasar yang sebagian besar dipasok dari luar wilayah tanpa SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan). Hal yang memprihatinkan lagi adalah bahwa dari 10 pasar yang diteliti semua ditemukan adanya virus H5N1. Berdasarkan uraian tersebut terdapat alasan yang kuat mengapa Pemda DKI Jakarta akan menerapkan peraturan perunggasan bahwa hanya ayam dalam bentuk karkas yang diizinkan memasuki pasar di wilayah DKI.

## Kondisi Tahun 2010 yang Diharapkan

Melalui serangkaian peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dan mensyaratkan bahwa unggas yang masuk wilayah DKI Jakarta harus sudah dalam bentuk karkas melalui pemasaran rantai dingin ditujukan untuk menghilangkan atau menghapuskan kasus Flu Burung pada manusia. Diharapkan tidak ada lagi pemeliharaan unggas di daerah pemukiman padat penduduk sehingga kesehatan dan sanitasi lingkungan terjaga. Perdagangan ayam hidup (*broiler* hidup) diharapkan tidak ada dan diganti dengan perdagangan daging ayam (*broiler* karkas) melalui pasar rantai dingin. Tempat Pemotongan Ayam (TPA) dan Tempat Penampungan Ayam (TPnA) di wilayah DKI sebanyak 5 lokasi ditempatkan di pinggiran Jakarta dengan fasilitas yang standar, sehingga dihasilkan ayam yang ASUH. Dalam masa transisi diharapkan 400.000 ekor ayam (*broiler*) dipotong di luar Jakarta dan 200.000 ekor dipotong di Jakarta dengan sistem pemotongan yang standar dan *hygienis*.

Skenario perubahan sistem tataniaga yang diduga akan terjadi adalah adanya perubahan pemasaran ayam hidup ke daging ayam, memaksa TPA dan TPnA tidak resmi ke luar wilayah DKI dan digantikan TPA dan TPnA resmi. Penanganan pengelolaan pemotongan dan penampungan ayam yang aman sehat utuh dan halal. Meskipun peraturan dan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta ini adalah langkah positif dalam penanganan pemeliharaan dan pengendalian peredaran unggas, namun kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar dan tepat diperkirakan akan membawa dampak negatif yang tidak diperkirakan sebelumnya baik bagi peternak maupun bagi masyarakat konsumen.

## Dampak Kebijakan Pemda DKI

Setiap implementasi kebijakan pasti akan menimbulkan dampak baik yang sifatnya positif maupun negatif, dan dampaknya berbeda-beda antar kelompok dalam masyarakat. Beberapa dampak negatif yang di duga akan muncul antara lain adalah: (a) Pada tahap awal implemmentasi diperkirakan akan terjadi ketidakstabilan pasokan komoditas ayam, yang selanjutnya akan diikuti kenaikan harga daging ayam, bahkan mungkin komoditas ini akan menghilang dari pasar; (b) Hilangnya sebagian mata pencaharian yang bergerak pada usaha perunggasan apabila tidak mampu menyesuaikan diri; dan (c) Tidak ada *social responsibility* dari penampung dan pemotong yang menghasilkan "*negative externality*". Sementara itu, di daerah pemasok utama ayam (*broiler*) akan terjadi over suplai dan harga ayam akan jatuh. Kalau pemerintah DKI tidak mampu mengawasi peredaran ayam akan terjadi perdagangan ilegal (*black market*) di wilayah DKI dalam bentuk ayam hidup. Kalau tidak ada koordinasi yang harmoni antara Pemda DKI dengan daerah pemasok dan respon yang positif dari seluruh pelaku industri perunggasan maka akan berdampak negatif terhadap sosial ekonomi industri perunggasan. Bahkan akan berdampak kepada tidak tercapainya pola pangan harapan dan *human development index* (HDI) yang ditargetkan pemerintah. Dari

uraian tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif dan biaya sosial yang ditimbulkan akan dapat menjadi lebih besar apabila kebijakan tersebut tidak direpson secara positif oleh seluruh *stakeholders* terkait.

Beberapa dampak positif yang diharapkan adalah : (a) terbangunnya lingkungan perkotaan lebih sehat; (b) peredaran ayam sepenuhnya dapat dikontrol dengan baik; (c) wabah penyakit tertanggulangi/terkontrol dengan baik; (d) memungkinkan diversifikasi usaha dengan bahan baku daging ayam; (e) Diperolehnya ayam yang ASUH; (f) Stok ayam lebih terpantau dan harga relatif lebih stabil; dan (g) adanya pengelolaan dan pemanfaatan limbah secara baik dan bertanggung jawab.

Upaya-upaya diversifikasi usaha yang dapat dilakukan pelaku ekonomi di wilayah DKI antara lain adalah : (a) pengolahan dan dan pemasaran produk olahan asal ayam melalui pengembangan produk; (b) pengembangan usaha penjualan dengan *freezer* rantai dingin; dan (c) Berkembangnya depo-depo ayam dengan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas pasokan yang terjamin.

## PENUTUP

Secara historis terdapat beberapa tahapan perkembangan bisnis perunggasan, paling tidak dapat dibagi ke dalam enam fase : (a) fase tahun 1990-1996 atau fase sebelum krisis moneter; (b) fase tahun 1997-1999, fase menghadapi krisis moneter dan ekonomi; (c) Fase tahun 2000-2009, sebagai fase terjadiya *outbreak Avian Influenza* yang terjadi pada tahun 2003-2004 dan *zoonosis* yang terjadi pada tahun 2005; dan (d) Fase 2010-masa mendatang, sebagai perubahan iklim (*climate change*) dan kebijakan penataan pasar unggas perkotaan dengan adanya kebijakan yang mensyaratkan bahwa unggas yang masuk ke wilayah DKI harus dalam bentuk karkas dan tidak boleh dalam bentuk ayam hidup. Secara empiris industri perunggasan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap gejala faktor-faktor baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Krisis terberat yang dirasakan peternak unggas justru pada tahun 2003-2004 ketika adanya AI (*Avian Influenza : Penyakit Strategis*) dan Tahun 2005 ketika pengumuman *zoonosis*. Hal ini antara lain disebabkan : (a) krisis berlangsung cukup lama (2003-2005); (b) krisis berlangsung hanya pada dunia perunggasan saja, bukan pada usaha lainnya; (c) dampak yang ditimbulkannya sangat dalam dan menyentuh seluruh subsistem dalam keseluruhan jaringan agribisnis perunggasan.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan tentang pengaturan pemeliharaan dan pengendalian peredaran unggas di wilayah DKI dan tuntutan pemasaran dari unggas hidup ke daging unggas melalui rantai dingin, maka diperkirakan akan menyebabkan permasalahan distribusi unggas hidup dari daerah pemasok utama ke wilayah DKI Jakarta. Kondisi ini menuntut peternak rakyat dan apalagi

peternak pemula disarankan untuk bergabung dengan kelompok/perusahaan peternak yang lebih besar dalam kemitraan usaha yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan. Selanjutnya harus merencanakan pengembangan peternakan mulai dari jumlah pasar, pangsa pasar, dan tujuan pasar yang dituju selanjutnya ke arah pengembangan produksi baik dari aspek jumlah dan distribusi antar waktu, serta sistem penanganannya.

Dari sisi permintaan produk yang dihasilkan oleh industri perunggasan (*broiler*) ke depan, harus disadari bahwa dengan adanya peraturan dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut dan permintaan konsumen semakin kompleks yang menuntut berbagai atribut produk yang lebih lengkap dan rinci seperti atribut keamanan produk (*safety attributes*), atribut nutrisi (*nutritional attributes*), atribut nilai (*value attributes*), atribut pengepakan (*package attributes*), atribut lingkungan (*ecolabel attributes*) dan atribut kemanusiaan (*humanistic attributes*), bagi peternak rakyat kemitraan usaha dan membangun manajemen rantai pasok (*supply chain management/SCM*) yang efisien melalui rantai dingin adalah tuntutan dan keharusan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam kemitraan usaha (*contract farming*) dalam kesepakatan kontrak harus memasukkan kewajiban bagi perusahaan inti untuk menyediakan fasilitas RPA dan TpnA yang standar, *cold storage* yang memadai dari segi kapasitas dan kualitasnya, dan alat angkut transportasi berpendingin, sehingga produk ternak peternak rakyat dapat sampai ke tujuan pasar (DKI Jakarta) dan tujuan pasar kota-kota lainnya dalam kondisi segar.

Bila kemitraan usaha dan SCM dapat berjalan dengan baik minimal terdapat empat keuntungan yang dapat diraih, antara lain adalah : (a) Peternak rakyat dapat tetap akses ke tujuan pasar utama DKI Jakarta dan kota-kota lainnya; (b) Adanya penambahan nilai yang antara lain meliputi dapat memenuhi peraturan dan kebijakan sehingga ayam bisa masuk, sesuai dengan pesanan dan preferensi konsumen, ketetapan dalam distribusi, dan kesesuaian dalam pembebanan biaya produksi; (c) Pengurangan biaya transaksi yang berdampak pada timbulnya respon terhadap pasar yang lebih berorientasi pada kepentingan pedagang pengecer (depo-depo ayam); (d) Pengurangan risiko bisnis, yaitu memberikan jaminan pemasaran produk dan pengembangan modal yang disesuaikan dengan adopsi teknologi serta peningkatan efisiensi maupun penambahan nilai produk yang dihasilkan; dan (e) SCM dalam industri perunggasan dapat dijadikan sarana alih teknologi dari perusahaan-perusahaan yang menguasai teknologi modern kepada peternak-peternak kecil sebagai mitra kerjanya. Proses alih teknologi tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas dan pemenuhan preferensi kualitas konsumen, terutama untuk tujuan pasar DKI yang mensyaratkan pemasaran dengan rantai dingin.

Implikasi kebijakan penting dari implementasi kebijakan Pemerintah DKI hanya akan berhasil kalau mampu mengintegrasikan antara berbagai aspek, baik aspek teknis, ekonomi atau bisnis, sosial kelembagaan dan aspek kebijakan dan peraturan. Beberapa aspek teknis yang harus dipersiapkan secara terpadu dari

daerah sentra produksi hingga ke pusat pasar DKI adalah : (a) penerapan biosecurity yang standar dalam usahaternak; (b) perbaikan sistem panen dan pasca panen dengan penyiapan rumah potong ayam (TPA) yang prima; (c) penyediaan moda transportasi berpendingin; (d) pengembangan Rumah Potong Unggas (RPU) yang standar di wilayah perbatasan dengan kapasitas yang memadai; dan (e) revitalisasi pengelolaan pasar-pasar tradisional.

Beberapa aspek ekonomi atau bisnis yang dipersiapkan antara lain adalah: (a) terjaminnya jumlah, kualitas, dan kontinuitas pasokan daging ayam; (b) lancarnya sistem distribusi dan pemasaran *broiler*; (c) adanya stabilitas harga daging ayam pada tingkat harga yang layak; serta (d) terjaminnya keamanan pangan bagi konsumen dan harga daging ayam yang terjangkau.

Beberapa aspek kelembagaan yang perlu dipersiapkan antara lain adalah : (a) konsolidasi kelembagaan kelompok peternak baik dari aspek keanggotaan, manajemen, dan permodalannya; (b) pengembangan kelembagaan kemitraan usaha terpadu yang dapat saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan, serta mampu menyediakan fasilitas infrastruktur *cold chain*; (c) revitalisasi kelembagaan pengelola pasar tradisional; dan (d) adanya koordinasi yang harmonis antar kelembagaan pemerintah dari daerah pemasok dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Sementara itu, aspek kebijakan dan peraturan yang perlu dipersiapkan adalah : (a) adanya sistem insentif bagi pelaku ekonomi yang memenuhi persyaratan dan disinsentif bagi pelaku ekonomi yang melanggar, melalui *reward and punishment*; (b) kebijakan investasi yang kondusif terutama bagi pengembangan sistem rantai dingin (*cold chain*) dan industri perunggasan secara keseluruhan; (c) adanya kebijakan perencanaan tata ruang wilayah yang jelas baik di daerah sentra produksi maupun di wilayah Pemda DKI bagi pengembangan industri perunggasan; dan (4) adanya keterpaduan antara kebijakan dan peraturan yang satu dengan yang lain, sehingga dalam implementasinya tidak saling berbenturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, Arief. 2008. Tantangan dan Peluang Peternakan di Tengah Krisis Global. Trobos, Januari 2009.
- Dinas Peternakan DKI. 2008. Laporan Tahunan. Dinas peternakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota. Jakarta.
- Ditjen Peternakan. 2008. Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Food Agriculture Organization. 2006. <http://www.fao.org>.
- Food Agriculture Organization. 2008. <http://www.fao.org>.

- Hardiyanto, Tri. 2009. Menghadapi Krisis dan Seluk Beluk Usaha Perunggasan. Di sampaikan pada Seminar Strategi Usaha Perunggasan dalam Menghadapi Krisis Global, MIPI-FAPET IPB, Gedung MB-IPB Bogor, 26 Oktober 2009.
- Irianto, G. L. I. Amien dan Elza Surmaini. 2000. Keragaman Iklim Sebagai Peluang Diversifikasi. Sumberdaya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.
- Irawan, B., B. Winarso, I. Sadikin, B. Rachmanto dan B. Wiryono. 2003. Analisis Faktor Penyebab Pelambatan Produksi Komoditas Pangan Utama. Laporan Hasil Penelitian. Proyek/Bagpro Pengkajian Teknologi Pertanian Partisipatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Biro Perencanaan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- ICN. August 2009. Market Intelligence Report on Livestock and Poultry Industry In Indonesia. PT. Data Consult. Business Survey and Report.
- Saptana. 1999. Dampak Krisis Moneter dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Profitabilitas dan Daya Saing Sistem Komoditi Ayam Ras di Jawa Barat. Tesis S2. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian. Bogor.
- Saptana, E. Basuno, dan Y. Yusdja. 2005. Dampak Ekonomi Flu Burung Terhadap Kinerja Industri Perunggasan di Provinsi Jawa Tengah (Suatu Kajian Atas Kasus Flu Burung di Kabupaten Semarang dan Klaten). Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SOCA) Vol. 5 No. 3 :283-294.
- Saragih, 1998. Agribisnis Berbasis Peternakan. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Setiarto, Edi. 2009. Kebijakan Perunggasan DKI Mulai 2010 dan Dampak Penerapannya. Di sampaikan pada Seminar Strategi Usaha Perunggasan dalam Menghadapi Krisis Global, MIPI-FAPET IPB, Gedung MB-IPB Bogor, 26 Oktober 2009.
- Trobos, 2009. Tutup Tahun Tak Menggembirakan. No. 112 Januari 2009 Tahun IX. Trobos Media Agribisnis Peternakan dan Perikanan.
- Trobos, 2009. Broiler Melemah, Telur Menguat. No. 115 April 2009 Tahun IX. Trobos Media Agribisnis Peternakan dan Perikanan.